

Judul : DPD Usul Enam RUU Masuk Prolegnas
Tanggal : Selasa, 13 Nopember 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2



PARIPURNA-
Pimpinan DPD RI
Nono Sampono,
Akhmad
Muqowam, dan
Darmayanti
Lubis memimpin
Pembukaan Masa
Sidang II Tahun
Sidang 2018-2019,
Senin (12/11).

CHARLIE LOPULLA/INDOPOS

DPD Usul Enam RUU Masuk Prolegnas

JAKARTA—DPD RI akan usulkan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).

RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU tentang Geologi, RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang

Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada Sidang ini dilaporkan juga bahwa masa Sidang 2018-2019, Komite I akan melakukan finalisasi RUU inisiatif DPD RI tentang Percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, Komite I akan melakukan pembahasan bersama DPR dan Pemerintah terkait RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; Sedangkan Komite II akan melakukan pembahasan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU BUMN dan melakukan

Pengawasan atas Undang-Undang Penerbangan; Sedangkan Komite III akan melakukan inventarisasi materi RUU perubahan UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan tentang Kepemudaan; dan Komite IV akan melanjutkan penyusunan pandangan dan pendapat terhadap RUU dari DPR/pemerintah terkait RUU tentang Konsultan Pajak, dan review terhadap APBN 2019.

"Saya berharap semua alat kelengkapan dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, selain itu harus dapat menyusun setiap agenda yang sesuai untuk dapat menyele-

saikan tugas dan kewenangan yang sudah disusun," ujar Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI.

Nono juga mengingatkan kepada alat kelengkapan DPD RI dan anggota untuk fokus menyelesaikan semua tugas dan kewenangan DPD RI terutama Program Legislasi Nasional pada Masa Sidang tahun 2018-2019 yang sangat singkat. "Saya sampaikan masa Sidang tahun 2018-2019 ini sangat singkat, akan tetapi semua alat kelengkapan harus mampu menyelesaikan semua agenda yang ada sesuai dengan tugas dan kewenangan ter-

utama dalam bidang legislasi," ujar Senator Maluku tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), John Pieris menyatakan bahwa pada masa sidang 2018-2019 DPD akan fokus mengerjakan enam RUU pada Prolegnas Prioritas 2019. "Kami mendorong adanya sosialisasi dan penyebarluasan program prolegnas yang dikerjakan oleh DPD RI. Hasil kesepakatan Tripartit antara DPD, DPR, dan Pemerintah perlu disosialisasikan ke daerah oleh PPUU 2019 mendatang," ujar John Pieris. (aen)